

## Interseksionalitas dalam Pendidikan Inklusif di Indonesia

Dharmika Pranidhi

Institut Nalanda, Indonesia

Alamat: Institut Nalanda, Jl. Pulo Gebang No. 107, RT 13/RW 04, Kelurahan Pulo Gebang,  
Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Jakarta 13950  
Korespondensi penulis: [dharmikapranidhi@nalanda.ac.id](mailto:dharmikapranidhi@nalanda.ac.id)\*

**Abstract.** *This study analyzes the implementation of inclusive education with a gender equality perspective in Indonesia, focusing on the gap between policy and practice, particularly for vulnerable groups such as girls with disabilities. Using a literature review (2020–2025), theoretical analysis (intersectionality, gender theory, inclusive education), and a case study of the Women’s School in Bali, the research finds that implementation remains partial and faces structural and cultural barriers, including gender stereotypes and limited teacher capacity. The case study highlights the potential of community-based approaches that integrate GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) and local wisdom to strengthen inclusive practices. The study emphasizes the need for systemic transformation through intersectional approaches, deconstruction of gender norms, and multi-stakeholder collaboration. Recommendations include strengthening intersectional policies, transformative teacher training, inclusive curricula, equitable resource allocation, and participatory research and monitoring.*

**Keywords:** *Education Policy, Gender Equality, Inclusive Education, Intersectional Approach, Literature Review.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis implementasi pendidikan inklusif berperspektif gender di Indonesia, dengan fokus pada kesenjangan antara kebijakan dan praktik, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak perempuan penyandang disabilitas. Melalui tinjauan literatur (2020–2025), analisis teoritis (interseksionalitas, teori gender, pendidikan inklusif), dan studi kasus Sekolah Perempuan di Bali, ditemukan bahwa implementasi masih bersifat parsial dan menghadapi hambatan struktural serta budaya, termasuk stereotipe gender dan keterbatasan kapasitas pendidik. Studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang mengintegrasikan GEDSI dan kearifan lokal berpotensi memperkuat praktik inklusi. Penelitian ini menekankan perlunya transformasi sistemik dengan pendekatan interseksional, dekonstruksi norma gender, dan kolaborasi multipihak. Rekomendasi meliputi penguatan kebijakan, pelatihan transformatif bagi guru, kurikulum inklusif, alokasi sumber daya yang adil, serta riset dan pemantauan partisipatif.

**Kata kunci:** Kebijakan Pendidikan, Kesetaraan Gender, Pendidikan Inklusi, Pendekatan Interseksionalitas, Literatur Reviews

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak asasi fundamental setiap individu, sebagaimana dijamin dalam konstitusi Indonesia dan berbagai deklarasi internasional (Hidayat, 2023). Komitmen ini tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-4 (pendidikan berkualitas) dan ke-5 (kesetaraan gender) (Ramadhania, 2024). Indonesia telah meresponnya melalui berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, serta Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Namun, di tingkat implementasi, masih terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Pendidikan inklusif kerap dimaknai secara terbatas hanya sebatas integrasi fisik anak berkebutuhan khusus (ABK) ke sekolah reguler, tanpa

mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dan kompleksitas identitas sosial yang saling beririsan. Kelompok seperti anak perempuan penyandang disabilitas, misalnya, menghadapi hambatan berlapis akibat stereotip gender, kekerasan simbolik maupun langsung, serta minimnya dukungan institusional dan kapasitas tenaga pendidik (Fauzi, 2025; FISIPOL UGM, 2024).

Dari sisi akademik, analisis yang mengintegrasikan perspektif pendidikan inklusif dan kesetaraan gender dalam konteks Indonesia masih sangat terbatas (Hidayat, 2024). Sebagian besar studi membahas kedua isu tersebut secara terpisah, tanpa menggunakan pendekatan interseksionalitas yang mampu menangkap kerentanan ganda. Gap ini mengindikasikan minimnya riset yang secara sistematis mengevaluasi efektivitas kebijakan dan praktik pendidikan inklusif berbasis gender, khususnya pada konteks sosial-budaya yang kompleks dan beragam di Indonesia (Hidayat, 2025). Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dan transformatif untuk menjawab tantangan multidimensional yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam sistem pendidikan. Tanpa integrasi analisis gender dan disabilitas, kebijakan pendidikan inklusif berisiko gagal mengakomodasi kebutuhan nyata peserta didik yang paling termarginalkan (Rizqiani, 2025).

Berdasarkan latar tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis implementasi pendidikan inklusif berperspektif kesetaraan gender di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan kerangka teori interseksionalitas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam integrasi kebijakan, praktik baik yang dapat direplikasi, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan kebijakan dan praktik pendidikan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap keberagaman identitas peserta didik.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Dalam mengkaji tantangan implementasi pendidikan inklusif yang berperspektif kesetaraan gender di Indonesia, studi ini menggunakan kerangka teoritis yang berpusat pada Teori Interseksionalitas. Teori ini tidak digunakan secara berdiri sendiri, tetapi menjadi lensa utama untuk memahami bagaimana ketimpangan dalam sistem pendidikan terbentuk, dipelihara, dan dapat ditransformasi, khususnya dalam konteks sosial-budaya Indonesia yang kompleks. Aspek-aspek relevan dari teori gender sebagai konstruksi sosial dan teori pendidikan inklusif akan diintegrasikan dan dilihat melalui perspektif interseksional.

### **Teori Interseksionalitas: Lensa Utama untuk Memahami Kerentanan Berlapis**

Dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw (1989, 1991), teori interseksionalitas memfasilitasi analisis terhadap irisan identitas sosial seperti gender, disabilitas, kelas, etnisitas, agama, dan geografi dalam menciptakan pengalaman ketimpangan yang unik dan berlapis. Teori ini menolak pandangan bahwa diskriminasi dapat dipahami secara terpisah berdasarkan satu kategori identitas saja. Sebaliknya, ia menekankan bahwa berbagai sistem penindasan (seperti patriarki, ableisme, rasisme, dan kapitalisme) saling beririsan dan memperkuat satu sama lain, menghasilkan pengalaman marginalisasi yang kompleks bagi individu yang berada di persimpangan identitas-identitas tersebut.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, teori interseksionalitas sangat relevan untuk memahami bagaimana kelompok rentan seperti anak perempuan penyandang disabilitas menghadapi hambatan berlapis. Studi menunjukkan bahwa mereka kerap terpinggirkan bukan hanya karena disabilitasnya, tetapi juga karena gender mereka, dan seringkali diperparah oleh faktor-faktor seperti status sosial-ekonomi rendah atau lokasi geografis (Fauzi, 2025; FISIPOL UGM, 2024). Kebijakan inklusi yang hanya mempertimbangkan satu dimensi kerentanan (misalnya disabilitas) tanpa memperhatikan irisan dengan faktor lain seperti gender dan kemiskinan, akan gagal secara efektif mengatasi diskriminasi berlapis ini. Data pendidikan yang masih terbatas pada kategori biner juga menghambat gambaran utuh tentang kerentanan interseksional.

### **Teori Gender sebagai Konstruksi Sosial dan Performativitas dalam Lensa Interseksional.**

Teori ini berpijak pada pandangan Butler (1990) dan West & Zimmerman (1987) yang menekankan bahwa gender bukan atribut biologis, melainkan hasil konstruksi sosial yang dilakukan terus-menerus melalui interaksi dan institusi. Dalam konteks pendidikan Indonesia, literatur (Ardiansyah et al., 2024; Nurseha, 2024; Putra, 2024/2025) mengungkap bahwa stereotip gender masih melekat kuat dalam kurikulum, distribusi peran, serta ekspektasi perilaku di sekolah. Hal ini tercermin dalam segregasi pilihan mata pelajaran, penggunaan bahasa pengajaran yang bias gender, serta rendahnya representasi perempuan dalam kepemimpinan sekolah. Norma maskulinitas hegemonik juga berdampak pada relasi guru-siswa yang tidak setara. Bahkan dalam program pendidikan inklusif sekalipun, dimensi gender kerap diabaikan. Dengan menerapkan teori ini, studi ini mengevaluasi bagaimana institusi pendidikan turut mereproduksi struktur patriarkal melalui kebijakan, interaksi sosial, dan kebudayaan sekolah, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan. Teori ini memperjelas

bahwa perubahan struktural memerlukan pembongkaran atas norma-norma gender yang selama ini diterima sebagai “wajar”.

### **Teori Pendidikan Inklusif dalam Kerangka Interseksional**

Teori pendidikan inklusif, sebagaimana dirumuskan UNESCO (2009) dan dikembangkan oleh Florian & Black-Hawkins (2011), menekankan perlunya transformasi sistem pendidikan agar mampu menjamin kehadiran, partisipasi, dan capaian semua peserta didik tanpa diskriminasi. Dalam kerangka interseksional, pendidikan inklusif tidak hanya berarti mengakomodasi siswa dengan disabilitas, tetapi juga secara aktif mengatasi hambatan yang muncul dari irisan berbagai identitas.

Prinsip Universal Design for Learning (UDL) (Meyer et. al., 2014) menawarkan pendekatan praktis untuk mendesain pembelajaran yang fleksibel dan responsif sejak awal. Dari perspektif interseksional, UDL harus diterapkan tidak hanya untuk mengakomodasi disabilitas, tetapi juga untuk merespons keragaman gender, latar belakang sosial-ekonomi, etnisitas, dan karakteristik lainnya. Kurikulum dan materi ajar harus dirancang untuk menghilangkan bias dan secara aktif mempromosikan kesetaraan bagi semua, tanpa memandang irisan identitas mereka.

Dengan menggunakan teori pendidikan inklusif melalui lensa interseksional, penelitian ini menilai bahwa pendidikan inklusif di Indonesia memerlukan pendekatan sistemik yang tidak hanya mengakomodasi keragaman, tetapi juga aktif membongkar norma dan struktur yang eksklusif dan bias, terutama yang muncul dari interaksi berbagai identitas. Ini berarti bergerak melampaui inklusi parsial menuju transformasi menyeluruh yang mengakui dan merayakan kompleksitas identitas peserta didik.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (literature review) yang bersifat kualitatif deskriptif-analitis untuk menganalisis implementasi pendidikan inklusif berperspektif kesetaraan gender di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji isu-isu kebijakan dan praktik pendidikan yang kompleks, saling beririsan, dan melibatkan dimensi struktural, kultural, serta normatif. Dalam konteks di mana studi empiris interseksional dalam pendidikan masih terbatas, studi pustaka menawarkan kontribusi penting melalui sintesis konseptual dan pengembangan pemahaman kritis berbasis teori.

## **Jenis dan Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan narrative literature review dengan elemen sistematis, yang memungkinkan pemetaan tematik dan analitis terhadap berbagai publikasi akademik dan kebijakan. Rancangan ini dipilih untuk mengakomodasi beragam jenis sumber (jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dokumen institusi), serta untuk membangun sintesis naratif yang mendalam berdasarkan kerangka teori interseksionalitas, gender, dan pendidikan inklusif. Pendekatan ini telah banyak digunakan dalam studi kebijakan sosial yang bersifat multidimensi dan lintas bidang.

Data sekunder diperoleh dari berbagai basis data akademik nasional dan internasional, antara lain Google Scholar, Garuda, SINTA, dan Scopus, serta laporan dari lembaga seperti Kementerian PPPA, Universitas Indonesia, dan FISIPOL UGM. Proses penelusuran dilakukan secara sistematis menggunakan kombinasi kata kunci: “pendidikan inklusif,” “kesetaraan gender,” “interseksionalitas,” “anak perempuan penyandang disabilitas,” “Universal Design for Learning (UDL),” dan “kebijakan pendidikan Indonesia.”

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Sintesis literatur (2020-2025) menunjukkan adanya jurang signifikan antara komitmen kebijakan nasional (Permendiknas No. 70/2009 tentang Pendidikan Inklusif; Inpres No. 9/2000 tentang PUG) dengan realitas implementasi pendidikan inklusif berperspektif gender di Indonesia. Temuan kunci dari tinjauan literatur adalah sebagai berikut:

### **Kesenjangan Kebijakan dan Implementasi**

Kebijakan pendidikan inklusif dan pengarusutamaan gender seringkali berjalan secara terpisah. Pendidikan inklusif cenderung berfokus pada disabilitas fisik atau sensorik, sementara isu gender seringkali hanya menyentuh aspek partisipasi tanpa mempertimbangkan bagaimana gender berinteraksi dengan disabilitas, etnisitas, atau status sosial-ekonomi (Fauzi, 2025; Pertiwi et al., 2025). Hal ini menyebabkan kebijakan tidak efektif dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh individu dengan identitas interseksional.

### **Stereotip Gender dan Diskriminasi Berlapis**

Kurikulum, materi ajar, dan praktik pengajaran di sekolah masih banyak mengandung stereotip gender yang membatasi potensi peserta didik (Ardiansyah et al., 2024; Nurseha, 2024). Bagi anak perempuan penyandang disabilitas, stereotip ini diperparah oleh stigma

disabilitas, menciptakan hambatan ganda dalam akses, partisipasi, dan capaian akademik. Mereka seringkali menghadapi ekspektasi yang lebih rendah dari guru dan orang tua, serta minimnya representasi positif dalam materi pembelajaran.

### **Keterbatasan Kapasitas Pendidik:**

Guru dan tenaga kependidikan umumnya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pendidikan inklusif yang berperspektif gender dan interseksionalitas. Pelatihan yang ada cenderung bersifat umum dan belum menyentuh kebutuhan spesifik peserta didik dengan kerentanan berlapis. Akibatnya, strategi pengajaran dan dukungan yang diberikan tidak memadai untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh kelompok ini (Amka, 2024/2025; Heryadi et al., 2024).

### **Fragmentasi Data dan Riset:**

Data pendidikan di Indonesia masih belum terpilah secara komprehensif berdasarkan irisan identitas (gender, disabilitas, etnisitas, status sosial-ekonomi). Keterbatasan data ini menghambat identifikasi kelompok rentan secara akurat dan perumusan kebijakan yang berbasis bukti. Riset yang menggunakan pendekatan interseksional juga masih minim, sehingga menyulitkan pemahaman mendalam tentang pengalaman marginalisasi berlapis di sekolah (FISIPOL UGM, 2024).

### **Peran Komunitas dan Kearifan Lokal:**

Meskipun terdapat banyak tantangan, beberapa inisiatif berbasis komunitas menunjukkan potensi besar dalam mempromosikan pendidikan inklusif yang responsif gender dan disabilitas. Pendekatan yang mengintegrasikan kearifan lokal dan melibatkan partisipasi aktif komunitas terbukti lebih efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi kelompok rentan. Studi kasus Sekolah Perempuan di Bali menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan holistik ini dapat diterapkan.

### **Pembahasan**

Hasil studi pustaka ini secara konsisten menunjukkan adanya diskrepansi antara retorika kebijakan pendidikan inklusif dan kesetaraan gender dengan implementasinya di Indonesia. Jurang ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan berakar pada tantangan struktural dan kultural yang mendalam.

Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, seperti Permendiknas No. 70/2009, cenderung mengadopsi model medis disabilitas yang berfokus pada "perbaikan" individu, bukan pada transformasi sistem. Demikian pula, kebijakan pengarusutamaan gender seringkali hanya menyentuh aspek partisipasi kuantitatif tanpa membongkar akar masalah struktural dan kultural. Teori interseksionalitas, yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw, menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana berbagai identitas sosial—seperti gender, disabilitas, kelas, dan etnisitas—berinteraksi secara simultan dan menghasilkan pengalaman marginalisasi yang unik. Dalam konteks pendidikan inklusif, analisis interseksional menuntut pengakuan bahwa peserta didik tidak dapat dilihat secara tunggal hanya dari satu identitas, melainkan harus dipahami melalui irisan berbagai kategori sosial yang saling bertumpuk. Ketika kedua kebijakan ini tidak diintegrasikan melalui lensa interseksional, dampaknya adalah kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan berlapis yang dihadapi oleh individu dengan identitas ganda, seperti anak perempuan penyandang disabilitas. Mereka tidak hanya menghadapi hambatan akses fisik, tetapi juga stereotip gender yang membatasi pilihan pendidikan dan karir, serta minimnya dukungan psikososial yang responsif terhadap kebutuhan spesifik mereka. Fragmentasi kebijakan ini mencerminkan kurangnya pemahaman sistemik tentang bagaimana berbagai bentuk diskriminasi saling beririsan dan memperkuat satu sama lain, sehingga solusi yang ditawarkan menjadi parsial dan tidak efektif.

Temuan mengenai stereotip gender dalam kurikulum dan praktik pengajaran menjadi lebih kompleks ketika dilihat dari teori gender yang menegaskan bahwa gender bukanlah atribut biologis tetap, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk dan dipertahankan melalui praktik sosial sehari-hari, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Konsep “doing gender” dari West dan Zimmerman (1987) menyoroti bagaimana norma-norma gender hegemonik terus direproduksi dalam interaksi di sekolah, mulai dari materi pelajaran hingga dinamika hubungan antara guru dan siswa. Norma-norma patriarkis yang dominan ini membatasi potensi anak-anak, terutama anak perempuan, dalam mengakses kesempatan belajar dan berpartisipasi secara setara. Lebih jauh, teori queer dan kajian kritis gender, seperti yang dikemukakan oleh Judith Butler, mengajak kita untuk mendekonstruksi norma-norma ini dengan cara menantang asumsi-asumsi tradisional dan membuka ruang bagi ekspresi identitas gender yang beragam.

Dalam konteks pendidikan inklusif, guru perlu dibekali dengan kesadaran dan kemampuan kritis untuk mengenali dan melawan bias gender agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif bagi semua peserta didik. Keterbatasan pemahaman guru tentang pendidikan inklusif yang berperspektif gender dan interseksionalitas adalah salah satu hambatan paling krusial. Pelatihan yang tidak memadai mengakibatkan guru

kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar yang kompleks dari peserta didik dengan identitas interseksional. Misalnya, seorang guru mungkin memahami kebutuhan adaptasi fisik untuk siswa dengan disabilitas, tetapi gagal mengenali bagaimana stereotip gender mempengaruhi partisipasi siswa perempuan penyandang disabilitas dalam mata pelajaran sains atau olahraga. Tanpa pemahaman interseksional, guru cenderung menerapkan pendekatan "satu ukuran untuk semua" yang justru memperparah marginalisasi. Pelatihan transformatif harus mencakup tidak hanya pedagogi inklusif, tetapi juga kesadaran kritis tentang bias gender, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, serta bagaimana semua ini saling berinteraksi dalam konteks kelas.

Misalnya, anak perempuan penyandang disabilitas tidak hanya menghadapi ekspektasi gender yang membatasi (misalnya, dianggap lebih cocok untuk peran domestik atau pekerjaan tertentu), tetapi juga stigma disabilitas yang merendahkan kemampuan intelektual atau fisik mereka. Kombinasi ini dapat menyebabkan mereka menjadi "tidak terlihat" dalam sistem pendidikan, atau hanya "ditoleransi" tanpa mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Kasus-kasus kekerasan simbolik, seperti bahasa yang merendahkan atau minimnya representasi positif dalam buku teks, menjadi lebih menyakitkan karena menyerang berbagai dimensi identitas mereka secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa upaya dekonstruksi norma gender harus secara eksplisit mempertimbangkan bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan disabilitas, kelas, atau etnisitas untuk menciptakan bentuk-bentuk diskriminasi yang unik dan berlapis.

Sementara itu, pendidikan inklusif sendiri, yang berakar pada prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan akses, menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan individual dan medis ke pendekatan sosial dan sistemik. UNESCO (2009) menekankan bahwa inklusi adalah tentang mengadaptasi sistem pendidikan secara menyeluruh agar mampu menampung semua siswa, tanpa diskriminasi. Konsep Universal Design for Learning (UDL) semakin menjadi rujukan dalam praktik pendidikan inklusif, dengan fokus pada fleksibilitas kurikulum dan metode pengajaran yang responsif terhadap kebutuhan beragam peserta didik. Prinsip kolaborasi multi-pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, hingga komunitas, menjadi kunci dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif yang efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan data yang terpilah secara interseksional merupakan cerminan dari kurangnya kesadaran akan pentingnya pendekatan ini dalam perumusan kebijakan. Tanpa data yang menunjukkan bagaimana gender, disabilitas, status sosial-ekonomi, dan faktor lainnya saling beririsan dalam mempengaruhi akses dan capaian pendidikan, sulit bagi pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang tepat sasaran. Misalnya, data yang hanya

menunjukkan angka partisipasi anak perempuan atau anak penyandang disabilitas secara terpisah tidak akan mengungkapkan bahwa anak perempuan penyandang disabilitas dari keluarga miskin adalah kelompok yang paling rentan putus sekolah. Riset yang menggunakan pendekatan interseksional sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan data ini dan memberikan bukti empiris yang kuat untuk mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

Temuan utama menggarisbawahi implementasi yang masih parsial, dominasi norma gender patriarkis, kapasitas guru yang belum memadai, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya penerapan analisis interseksional dalam memahami dan merespons kebutuhan beragam peserta didik, khususnya mereka yang berada di persimpangan identitas marginal seperti anak perempuan penyandang disabilitas. Interpretasi temuan ini melalui lensa teoritis menegaskan bahwa upaya mewujudkan pendidikan inklusif berperspektif gender memerlukan transformasi yang lebih fundamental daripada sekadar penyesuaian program.

Salah satu contoh penerapan prinsip-prinsip interseksional dan pendidikan inklusif yang holistik dapat ditemukan pada Studi Kasus Sekolah Perempuan di Bali. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan terminologi “interseksionalitas” dalam operasionalisasinya, sekolah ini secara implisit mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang menghadapi tantangan disabilitas, kemiskinan, atau marginalisasi sosial lainnya. Pendekatan yang mengintegrasikan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dan kearifan lokal—seperti nilai kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat Bali—menunjukkan bagaimana solusi yang responsif terhadap konteks lokal mampu mengatasi hambatan berlapis yang dihadapi peserta didik.

Sekolah Perempuan tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga membangun lingkungan yang mendukung di mana identitas-identitas yang berbeda diakui dan dirayakan. Fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas disediakan, sekaligus kurikulum yang menantang stereotip gender dan mendorong kepemimpinan perempuan. Keterlibatan komunitas lokal dan pemanfaatan nilai-nilai budaya memastikan bahwa program-program tersebut relevan dan efektif dalam konteks sosial budaya peserta didik, mengatasi hambatan yang mungkin tidak terdeteksi oleh pendekatan universalistik. Model ini menegaskan bahwa inklusi sejati memerlukan pengakuan atas kompleksitas identitas dan perancangan intervensi yang secara sadar mengatasi irisan diskriminasi. Keberhasilan Sekolah Perempuan di Bali menggarisbawahi potensi pendekatan berbasis komunitas yang secara inheren bersifat interseksional. Pendekatan ini tidak sekadar “menambahkan” kelompok rentan ke dalam sistem yang ada, melainkan menciptakan sistem baru yang secara fundamental

dirancang untuk merespons keragaman identitas dan pengalaman. Model ini menjadi inspirasi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di Indonesia yang lebih responsif dan transformatif, dengan menempatkan penguatan kapasitas lokal dan pemberdayaan komunitas sebagai agen perubahan utama.

Penggabungan ketiga perspektif ini — interseksionalitas, teori gender, dan pendidikan inklusif — menuntut pendekatan holistik yang tidak hanya memperhatikan keberagaman identitas dan pengalaman peserta didik, tetapi juga mengatasi struktur sosial yang menimbulkan ketidaksetaraan. Hal ini termasuk mereformasi kebijakan yang bersifat top-down dengan melibatkan suara komunitas terdampak, mengembangkan kurikulum yang kritis dan reflektif terhadap isu-isu sosial, serta melatih guru agar mampu mengelola keragaman dengan empati dan pemahaman mendalam. Dengan demikian, pendidikan inklusif yang berperspektif gender dan interseksional tidak hanya menjadi program aksesoris, melainkan menjadi bagian integral dari transformasi sistem pendidikan nasional.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Studi pustaka ini menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan inklusif yang berperspektif kesetaraan gender di Indonesia masih jauh dari optimal, ditandai oleh kesenjangan signifikan antara kebijakan dan praktik serta tantangan multidimensional yang berakar pada isu struktural dan kultural. Analisis komprehensif terhadap literatur (2020-2025) melalui lensa interseksionalitas, teori gender, dan teori pendidikan inklusif mengidentifikasi tantangan utama meliputi implementasi parsial, persistensi stereotip gender, kapasitas guru yang terbatas, kurangnya sumber daya, dan terutama kegagalan sistemik untuk menerapkan analisis interseksional dalam mengatasi kerentanan berlapis yang dihadapi siswa, khususnya anak perempuan penyandang disabilitas. Meskipun terdapat praktik baik potensial berbasis komunitas dan kolaborasi multi-pihak, pencapaian tujuan pendidikan yang benar-benar inklusif dan setara gender memerlukan transformasi sistemik yang didukung komitmen politik kuat, kebijakan terintegrasi, sumber daya memadai, dan perubahan pola pikir di semua tingkatan untuk secara aktif mendekonstruksi norma diskriminatif dan merangkul keberagaman secara utuh.

Rekomendasi utama meliputi penguatan kebijakan berbasis interseksionalitas dengan mengintegrasikan analisis GEDSI secara eksplisit dalam seluruh siklus kebijakan pendidikan dan menyinkronkan peraturan terkait dengan indikator terpilah yang menyeluruh. Selanjutnya, diperlukan transformasi kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pengembangan profesional berkelanjutan yang holistik, mengintegrasikan pedagogi inklusif (termasuk UDL)

dengan kesadaran kritis terhadap teori gender, bias, stereotip, dan analisis interseksional. Penting pula melakukan pengembangan kurikulum dan lingkungan belajar transformatif dengan merevisi materi ajar untuk menghilangkan bias, mengintegrasikan nilai kesetaraan dan HAM, serta menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang aman dan aksesibel. Hal ini harus didukung oleh alokasi sumber daya yang adil dan aksesibel, memastikan anggaran memadai untuk sarana, teknologi asistif, materi ajar beragam, dan dukungan individual. Selain itu, perlu penguatan kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, orang tua, dan komunitas, serta dukungan terhadap inisiatif lokal berbasis GEDSI yang efektif. Upaya ini perlu dilengkapi dengan kampanye sosial berkelanjutan untuk mengubah norma diskriminatif, serta penelitian dan pemantauan partisipatif berbasis interseksionalitas menggunakan data terpilah untuk mengukur kemajuan dan menginformasikan perbaikan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abiyyah, F., & Nugorho, B. (2024/2025). Implementasi filosofi pendidikan inklusi dalam sistem pendidikan Indonesia. OSF Preprint. <https://osf.io/s4k8b/>
- Agista. (2024). Peningkatan pendidikan inklusif dan berkeadilan: Jejak kerjasama Indonesia–UNESCO. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 3(2), 1-8.
- Amka, H. (2024/2025). Pendidikan inklusif (Dari teori ke aksi). Bravo Press / Repository Dosen ULM.
- Ardiansyah, Jailani, M. S., & Isma, A. (2024). Pendidikan telaah kritis paradigma dan problematika perempuan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(4), 4345–4355.
- Astawa, G. (2025, May 27). Dubes Australia dan Wamen PPPA kunjungi sekolah perempuan di Bali, perkuat kesetaraan gender dan pembangunan inklusif. Fajar Bali. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. (2025, Februari). Implementasi pengarusutamaan gender sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), Article 8.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299. Crenshaw, K. (2017). *On intersectionality: Essential writings*. The New Press.

- Fanani, I. Y., Wakhidah, E. N., Nabila, L. A., & Sulaeman, M. A. (2025). Kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam membentuk karakter religius pada anak sekolah luar biasa di Jawa Tengah. *Jurnal Simki Pedagogia*, 8(1), 44–54.
- Fatoni, C. E. M., Abdullah, D. A., Nugroho, F. P., Pamungkas, G. R., Agustian, M. D. D., Imron, R. A., Akbar, S. H., & Priyambodho, S. D. (2025). Pengaruh status minoritas terhadap keadaan psikologis mahasiswa perempuan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Majemuk*, 4(1), 1–7.
- Fauzi, A. (2025, Februari 25). Penyusunan kebijakan yang inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender, penguatan perempuan, pemuda, dan penyandangdisabilitas [Paparan Kebijakan]. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI / IPDN.
- Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. *British Educational Research Journal*, 37(5), 813–828. <https://doi.org/10.1080/01411926.2010.501096>
- Heryadi, D., Suherman, A., & Nugraha, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 8(1), 112-125.
- Hidayatullah, A., & Priyatmono, A. F. (2024). Inclusive school of Yogyakarta with universal design and multi sensory approach [Naskah Publikasi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Judijanto, L., Caroline, C., & Aminudin S, M. D. (2025). Strategi pendidikan inklusif: Studi literatur tentang upaya mengatasi kesenjangan pendidikan di berbagai negara. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 10–25.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering (Technical Report EBSE 2007-001). Keele University & Durham University Joint Report.
- Lembaga Budaya, Seni dan Olahraga Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Parepare (Ed.). (2025). *Aisyiyah menjawab tantangan zaman*. Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Meyer, A., Rose, D. H., & Gordon, D. (2014). *Universal design for learning: Theory and practice*. CAST Professional Publishing.
- Mitchell, D. (2020). *What really works in special and inclusive education: Using evidence-based teaching strategies* (3rd ed.). Routledge.
- N. Hidayat, S. Sutrisno, and T. Permatasari, “Transformasi Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda menjadi Institut Agama Buddha Nalanda: Tinjauan Studi Kelayakan dalam Konteks Sosial Budaya”, *Innovative*, vol. 3, no. 5, pp. 4174–4189, Oct. 2023.
- Nur Rizky Ramadhania, N. H. (2024). Analysis of clean ocean campaign framing in Instagram account posts @pandulaut.id and @theoceancleanup. *International Journal of Environmental Communication (ENVICOMM)*, 2(1), 11–23. <https://doi.org/10.35814/envicomm.v2i1.6914>
- Nurseha, I. (2024). Ketimpangan gender dalam keputusan rumah tangga: Studi interseksi ekonomi, pendidikan, dan konstruksi sosial. *Masadir*, 4(2), 947-968.

- Nurul Hidayat, N. P. (2024). Peningkatan keterampilan keamanan digital pada siswa SMK Ananda Bekasi di era disrupsi digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 234–242. <https://doi.org/10.56910/wrd.v4i3.432>
- Nurul Hidayat, S. N. (2022). Pengaruh menonton film *The Tinder Swindler* terhadap self-disclosure perempuan di Kota Bogor. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 7181–7190. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7867>
- Nurul Hidayat, “Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital”, *PACIVIC*, vol. 5, no. 1, pp. 105–118, Apr. 2025, doi: [10.36456/p.v5i1.10183](https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10183).
- Prasetya Pertiwi, E., Ali, A. Z., Budiyanto, & Sartinah, E. P. (2025). Filosofi dan Prinsip Dasar Pendidikan Inklusi: Implikasi terhadap Masalah Sosial Masyarakat. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1 Februari), 329-346. <https://doi.org/10.58230/27454312.1817>
- Putra, A. (2024/2025). Gender dalam pendidikan: Pendidikan dan pembelajaran untuk mewujudkan kesetaraan. *Eureka Media Aksara*.
- Rahmat, A., & Setiawan, D. (2023). Tantangan Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Basicedu*, 7(2), 1234-1245.
- Sari, D. P., & Widyastuti, A. (2022). Peran Guru dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Kesetaraan Gender di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 55-68.
- Tim Kajian Inklusi Sosial dan Kewargaan Demokratik FISIPOL UGM. (2024, Oktober). Mewujudkan kebijakan inklusif untuk semua (Sejalin Policy Brief Series). Universitas Gadjah Mada.
- UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs*
- Wiwit Rizqiani and Nurul Hidayat, “Analisis Frekuensi dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Gender : Studi Kasus Masyarakat Buddhis di Indonesia”, *Dharmavicaya*, vol. 8, no. 2, pp. 62–71, Mar. 2025.